

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koordinasi

2.1.1. Pengertian koordinasi

Koordinasi terkadang disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih dari pada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. Untuk mencapai tujuan yang kolektif perlulah dilakukan koordinasi yang baik sehingga kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama dan diantara yang melakukan kerja sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Silalahi dalam Yuli Setyowati, koordinasi adalah intergrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.⁷

Koordinasi dapat terjadi apabila ada dua atau lebih orang atau instansi yang melakukan kerja sama, selain itu juga koordinasi tercipta karena pelaku kerja sama satu sama lainnya saling mempengaruhi. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang

⁷ Yuli Setyowati, 2019. *Komunikasi, Media dan Pemberdayaan Masyarakat. Sinergi Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press. Hal:175-176

seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan menurut G.R. Terry dalam Hasibuan. Melihat dari pendapat G.R. Terry di atas dapat disimpulkan koordinasi dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang sinkron antara yang melakukan kerja sama. Hasibuan menjelaskan bahwa koordinasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan suatu usaha, kerjasama antar badan, instansi, unit pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling melengkapi.⁸

2.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan koordinasi yaitu sebagai berikut:⁹

1. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu cara untuk mencapai koordinasi yang baik dengan sebuah perencanaan kegiatan yang baik diantara kedua belah pihak serta bekerja secara bersama-sama dan konsisten untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, kerjasama antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan kelompok tani dilakukan secara bersama-sama secara berkelanjutan demi tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut.

⁸ Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara Hal:85

⁹ Ibid Hal:88

2. Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk mewujudkan koordinasi yang baik karena dengan adanya komunikasi, semua pihak yang terlibat akan lebih mudah untuk saling memahami satu sama lain mengenai apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan, dan keselarasan program yang dibuat. Komunikasi yang baik diantara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian akan memastikan pemahaman program dan kebijakan yang dibuat diantara keduanya sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok tani.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan perincian tugas individu atau kelompok yang menjadi tanggungjawab masing-masing pihak guna menjaga efektivitas dan efisiensi kinerja mereka. Dalam hal ini, pembagian kerja antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Disiplin

Disiplin merupakan salah satu usaha yang dilakukan agar apa yang dilakukan terkoordinasi dengan baik dengan cara memastikan semua yang dilakukan sudah terstruktur dan terarah, baik dari pelaksanaan waktu maupun tempat kegiatan. Pada penelitian ini, kedisiplinan Pemerintah Desa maupun Dinas Pertanian sangat diperlukan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani agar lebih efektif dan efisien.

2.2. Pemberdayaan

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan

Sekarang ini, istilah "pemberdayaan" semakin populer dalam konteks penggunaan dan pengetasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) terkait dengan kekuasaan (*power*). Konsep ini bermula dari kenyataan bahwa seseorang atau masyarakat tidak berdaya atau pihak yang lemah. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan orang lain memiliki hubungan dengan kekuasaan. Kemampuan tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dan mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan keinginan orang lain.¹⁰ Dalam konteks implelementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (*community development*) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun NGO sering menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berhubungan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Menurut Soeharto, konsep dasar tentang pemberdayaan atau pemberkuasaan (pemberdayaan) terkait langsung dengan gagasan kekuasaan, yang berasal dari kata "*power*", yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh

¹⁰ Maryani, D. & Nainggolan, R. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. Hal 76

karena itu, kekuasaan selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan, meskipun mereka juga memiliki keinginan sendiri yang disembunyikan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat sekelompok orang yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.¹¹

Pemberdayaan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk bernegosiasi dan mengontrol lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka, ini merupakan pemberdayaan menurut *world bank* dalam Zubaedi. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat mengacu pada pengalihan kekuasaan pada kelompok masyarakat melalui penguatan modal sosial untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. *Participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. *Empowering* berarti pembangunan yang dilakukan dengan memberikan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat. *Sustainable* berarti pembangunan yang berkelanjutan.¹²

Menurut Alfitri, Paradigma pemberdayaan masyarakat, yang merupakan masalah utama, muncul dari fakta bahwa ada perbedaan yang tidak dapat

¹¹ Soeharto, 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Hal 15

¹² Zubaedi, 2014. *Pengembangan Masyarakat. Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal:74

diperbaiki, terutama antara masyarakat yang tinggal di perdesaan, terpencil, dan terbelakang. Pada dasarnya pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan fokus pembangunan. Paradigma pemberdayaan menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah proses pembangunan yang mendorong inisiatif masyarakat dari tingkat bawah.¹³

Djohani mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga menjadi keseimbangan.¹⁴ Pemberdayaan tekanan pada aspek pendelegasian atau pemberian kekuasaan dan memberi wewenang atau penyerahan kekuasaan pada individu, kelompok, atau masyarakat yang mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai keinginan, potensi, dan kemampuan mereka.¹⁵ Pemberdayaan juga menekankan pentingnya proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau sehingga masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, dan hidup sendiri.

2.2.2. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Soekanto dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat, ada tujuh langkah yang bisa dilakukan, yaitu:¹⁶

¹³ Alfitri, 2011. *Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal:21

¹⁴ Djohani, Rianingsih, 2003. *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Studio Driya Media. Hal:43

¹⁵ Bahri, E. S. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Jakarta: FAM Publishing. Hal 52

¹⁶ Op Cit, Soeharto Hal:21

1. Persiapan, yang bisa dilakukan dalam tahap persiapan, yakni penyimpanan petugas yang berarti tenaga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh *community worker* dan penyiapan wadah yang berusaha dilakukan dengan arahan tak langsung.
2. Pengkajian (*asesment*), dimana proses pengkajian dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok-kelompok di masyarakat. Pada tahap ini, petugas harus bisa mengidentifikasi persoalan kebutuhan yang dirasakan (*feel neds*) dan sumber daya.
3. Perencanaan alternatif program, disini petugas yang memegang peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) berpartisipasi melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang persoalan yang dihadapi serta solusi atas persoalan tersebut. Masyarakat dalam konteks ini diharapkan mempunyai beberapa alternatif program yang bisa dijalankan.
4. Formalisasi rencana aksi, disini agen perubahan membantu kelompok-kelompok dalam merumuskan serta menetapkan program yang bisa dijalankan sebagai solusi persoalan yang ada. Selain itu, agen pun membantu dalam proses formalisasi ide ke dalam tulisan terlebih jika ada pembuatan proposal untuk donatur dana.
5. Implementasi program, masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga kelangsungan program yang sudah dikembangkan. Sinergi petugas dan masyarakat adalah hal penting di tahap ini sebab kondisi di lapangan bisa jadi berbeda dengan rencana awal.

6. Evaluasi, dimana akan berjalan baik jika melibatkan masyarakat sebab akan bisa terbentuk sistem komunitas masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Terminasi, pada tahap ini terjadi pemutusan hubungan formal dengan komunitas target dan proyek sudah harus segera dihentikan.

2.2.3. Indikator pemberdayaan

Menurut Setiani dalam Nur Dwi Alfiansyah menyebutkan indikator hasil pemberdayaan meliputi *input*, proses, *output* dan *outcome*. Berikut penjelasan dari ke empat indikator tersebut:¹⁷

1) *Input*

Input adalah semua sumber daya yang digunakan untuk mendukung dan menjalankan kegiatan pemberdayaan. Tanpa input, tidak mungkin sebuah program pemberdayaan dapat direncanakan apalagi dilaksanakan . Input meliputi sumber daya manusia, dana, bahan-bahan dan alat-alat yang mendukung kegiatan pemberdayaan. Contohnya, jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang terlibat peralatan yang digunakan dan jumlah bahan yang digunakan.

2) Proses

Proses adalah rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif untuk mengubah input menjadi hasil nyata.

¹⁷ Nur Dwi Alfiansyah 2018. Pemberdayaan pasca PNM. Universitas Brawijaya, FISIP, *Ilmu Administrasi Publik*, Skripsi Malang, Jawa Timur. Hal 16-18

Tahap ini sangat krusial karena merupakan fase pelaksanaan. Proses meliputi jumlah penyuluhan yang dilaksanakan, frekuensi pelatihan yang dilaksanakan, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan.

3) *Output*

Output adalah hasil jangka pendek dari proses pemberdayaan. Umumnya bersifat kuantitatif (bisa dihitung/jumlah) dan langsung terlihat setelah kegiatan selesai. *Output* meliputi jumlah dan jenis usaha yang bersumber dari masyarakat, jumlah masyarakat yang telah meningkatkan pengetahuan dan perilakunya, jumlah anggota keluarga yang memiliki usaha meningkatkan pendapatan keluarga, dan meningkatkan fasilitas umum di masyarakat. Contohnya, jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan dan jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan.

4) *Outcome*

Outcome adalah dampak atau perubahan nyata dan signifikan dalam kehidupan masyarakat setelah mereka menggunakan *output* yang dihasilkan. *Outcome* lebih bersifat kualitatif dan terjadi dalam jangka menengah hingga panjang. *Outcome* dari pemberdayaan masyarakat mempunyai kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan angka kelahiran serta meningkatkan status gizi kesehatan masyarakat.

2.3. Kelompok Tani

2.3.1 Pengertian Kelompok Tani

Umumnya, kelompok tani adalah kelompok pertanian yang dibentuk oleh petani yang saling mengenal, akrab, dan percaya satu sama lain, memiliki kepentingan dalam usaha tani, dan memiliki kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya). Kelompok-kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Kelompok-kelompok ini dibentuk oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, dan percaya satu sama lain, memiliki kesamaan dalam hal tradisi, pemukiman. Kelompok tani membantu petani yang tergabung dalam keanggotaan untuk memfasilitasi segala kebutuhan mulai dari pembelian sarana produksi sampai penanganan pascapanen dan pemasaran-nya.

Kelompok tani juga dapat diartikan organisasi non-formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan “dari, oleh dan untuk petani”. Kelompok tani merupakan kelembagaan (institusi) non-formal dipedesaan yang beranggotakan petani-petani yang mempunyai kepentingan yang sama, yakni meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Menurut Mardikanto Kelompok tani adalah kelompok atau kesatuan yang hidup bersama karena mereka saling mempengaruhi dan bertahan lama. Terbentuknya kelompok tani memiliki banyak keuntungan, seperti berikut:¹⁸

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok
2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani
3. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru
4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani
5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya
6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Kelompok tani biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kondisi di lingkungan petani. Dengan membentuk kelompok petani yang memahami, pelatihan yang diberikan untuk membantu petani menjadi mandiri, mengembangkan inovasi, dan menganalisis usahatani mereka, sehingga petani dan keluarga dapat memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang layak. Dibentuknya kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kerjasama petani dan nelayan baik di dalam organisasi kelompok tani maupun dengan pihak lain di luar kelompok tani. Kerjasama ini diharapkan akan menjadikan kelompok pertanian lebih produktif dan lebih mampu

¹⁸ Totok Mardikanto, 2003. *Redefinisi Penyuluhan*. Jakarta : Penerbit Puspa. Hal:110

mengatasi masalah, hambatan, gangguan, dan ancaman yang terkait dengan pertanian. bisa juga digunakan sebagai tempat petani belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengurus dan anggota.

Kawasan usaha tani ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia, dan buatan; fasilitasi. Asuransi Pertanian berfungsi untuk melindungi petani dari gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan risiko lain yang ditetapkan oleh menteri. Selain itu, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, asuransi pertanian juga dapat memberikan kompensasi gagal panen. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, upaya pemberdayaan juga sangat penting selain kebijakan perlindungan terhadap petani. Upaya ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir petani, meningkatkan usaha mereka, dan menumbuhkan serta memperkuat kelompok petani mereka sehingga mereka dapat menjadi usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.

Salah satu komponen terbentuknya kelompok tani yang efektif adalah berlangsungnya kepemimpinan dari pengurus kelompok yang berpartisipasi dalam struktur kerja kelompok. Dinamika kelompok sangat diharapkan agar kelompok tani dapat berkembang dengan wajar, sehingga perkembangan kelompok dapat diarahkan dan berlangsung secara dinamis. Selain itu, kelompok tani juga harus mengembangkan kader pengurus yang akan menjadi penerus kelompok tani. Kelompok tani tidak bisa terbentuk tanpa adanya unsur-unsur, fungsi, dan tujuan kelompok tani. Dibawah ini akan disebutkan unsur-unsur

terbentuknya kelompok tani, fungsi dan tujuan kelompok tani menurut Hertiani Simanjuntak.¹⁹

2.3.2. Unsur-unsur Terbentuknya Kelompok Tani

Kelompok tani tidak terbentuk begitu saja tanpa adanya unsur-unsur yang jelas, Hertiani Simanjuntak menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 (lima) unsur terbentuknya kelompok tani yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya.
2. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya.
3. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya.
4. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
5. Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

2.3.3. Fungsi Kelompok Tani

Umumnya ada banyak fungsi kelompok tani, tapi Hertiani menyebutkan 3 (tiga) fungsi kelompok tani yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Hertiani Simanjuntak, 2024. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan kelompok Tani*. Skripsi. Medan:Universitas Medan Area. Hal:24-26

1. Kelompok tani adalah wadah belajar mengajar bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (PKS) serta menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian dalam pertanian, sehingga produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan meningkat.
2. Wahana Kerjasama Kelompok: Ini adalah tempat untuk meningkatkan kerjasama antara petani dalam kelompok, antar kelompok, dan dengan pihak lain. Dengan bekerja sama, usahatannya diharapkan menjadi lebih produktif dan lebih tahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
3. Unit produksi, yaitu usaha tani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, harus dianggap sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.

2.3.4. Tujuan Pengembangan Kelompok Tani

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk melaksanakan fungsi dan memberikan kemampuan kepada para anggotanya untuk mengembangkan agribisnis, sehingga kelompok tani berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dengan ciri-ciri berikut:²⁰

1. Adanya pertemuan /rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.

²⁰ Ibid Hal 29-32

2. Disusunnya rencana kerja kelompok (RDK/RDKK) secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif.
3. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama.
4. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih.
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir.
6. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar.
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.
8. Adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain.
9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

2.3.5. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 terkait Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menyebutkan kelompok tani ditumbuhkan dan dikembangkan dengan cara memberikan kekuatan kepada petani untuk mengubah pikiran mereka dalam rangka meningkatkan usaha tani dan kemampuan kelompok dalam menjalankan tugasnya. Karena kelompok tani terdiri dari para petani yang telah membentuk ikatan informal berdasarkan kepentingan bersama, sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan, keakraban, dan keharmonisan, serta para pemimpin yang mereka pilih untuk membantu mereka mencapai tujuan bersama, kelompok tani

memainkan peran kelembagaan yang sangat besar di daerah perdesaan dalam mendukung dan mengimplementasikan berbagai program yang sedang dan akan diimplementasikan untuk mencapai pembangunan pertanian yang lebih baik. Kelompok tani memberi petani sesuatu untuk dilakukan dengan kehidupan mereka.

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan "pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa." Melalui pemberdayaan diharapkan adanya peningkatan kemampuan seseorang, khususnya kelompok petani, agar dapat mandiri dan hidup sejahtera. Dalam kesehariannya, para petani di pedesaan sering kali mengalami masalah dan keterbatasan. Beberapa masalah tersebut adalah kurangnya pendidikan, keterampilan yang kurang baik, dan terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan pelatihan.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, menyatakan bahwa:

1) Kelompok tani (POKTAN) adalah sekumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkat-kan dan mengembangkan usahanya.

2) Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Pemerintah memiliki program dalam pemberdayaan kelompok tani yaitu dengan memberikan penyuluhan pertanian yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 dilakukan secara integrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Penyuluhan ini dapat menunjukkan kompetensi penyuluh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi, budidaya, harga, akses, pasar dan pemodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh.

2.4. Hubungan antara Peran Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemberdayaan kelompok tani merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam sektor pertanian. Menurut Labolo, untuk mengembangkan dan memajukan Negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlu adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran secara aktif kepada masyarakat. Labolo mengemukakan bahwa ada tiga dasar

peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:²¹

1. Pemerintah sebagai regulator

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan dan menggerakkan masyarakat dalam peran regulatornya, yang berarti mereka harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menetapkan dan menetapkan peraturan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah memberikan pedoman dasar untuk kegiatan pemerintah, dan masyarakat umum menggunakan pedoman ini untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah memberikan pedoman dasar ini, yang kemudian digunakan oleh masyarakat umum sebagai pedoman untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yang melibatkan memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat dan memberikan arahan dan dorongan kepada masyarakat untuk bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan tanpa mempertimbangkan kelas sosial. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta

²¹ Labolo Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali pers. Hal:36

menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah harus menjadi agen yang mampu membuat dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terbuka, serta berperan untuk menyambungkan kepentingan pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasi kegiatan pembangunan daerah. seperti memberikan rekomendasi dan sarana untuk pembangunan, baik untuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah membantu melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendanaan untuk menyediakan modal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah yang berperan penting pada pemberdayaan kelompok tani yang ada di tingkat desa adalah Dinas Pertanian melalui kebijakan daerah dan program bantuan bibit dan pupuk bersubsidi dan juga Pemerintah Desa sebagai lapisan paling dasar dari struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa. Maka dari itu, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian untuk memaksimalkan pemberdayaan kelompok tani.

2.4.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 22 berbunyi "Desa dapat mengembangkan potensi desa, termasuk potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan." Berdasarkan undang-undang ini, desa dapat mengembangkan program pemberdayaan kelompok tani yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

2.4.2. Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Dinas Pertanian merupakan bagian dari pemerintah daerah yang diberikan tugas khusus dari Bupati ataupun Walikota untuk mengatur sektor pertanian di tingkat Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 78 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan kepada Desa dalam mengembangkan potensi desa, termasuk potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan." Pasal ini sudah menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan kepada desa dalam mengembangkan potensi desa, termasuk potensi pertanian dan pemberdayaan kelompok tani. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian sudah selayaknya memberikan bantuan dan dukungan kepada Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan kepada kelompok tani yang sesuai dengan potensi Desa.

Melihat dari kedua peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki wewenang penuh dalam mengelola desanya termasuk melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian yang berperan sebagai fasilitator dan pendukung program pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Keselarasan program dan kebutuhan inilah yang perlu di koordinasikan antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian, karena masing-masing instansi memiliki tugas dan wewenangannya. Pemerintah Desa dengan program dan kebutuhan masyarakatnya, serta Dinas Pertanian dengan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

2.5. Kerangka Pikir

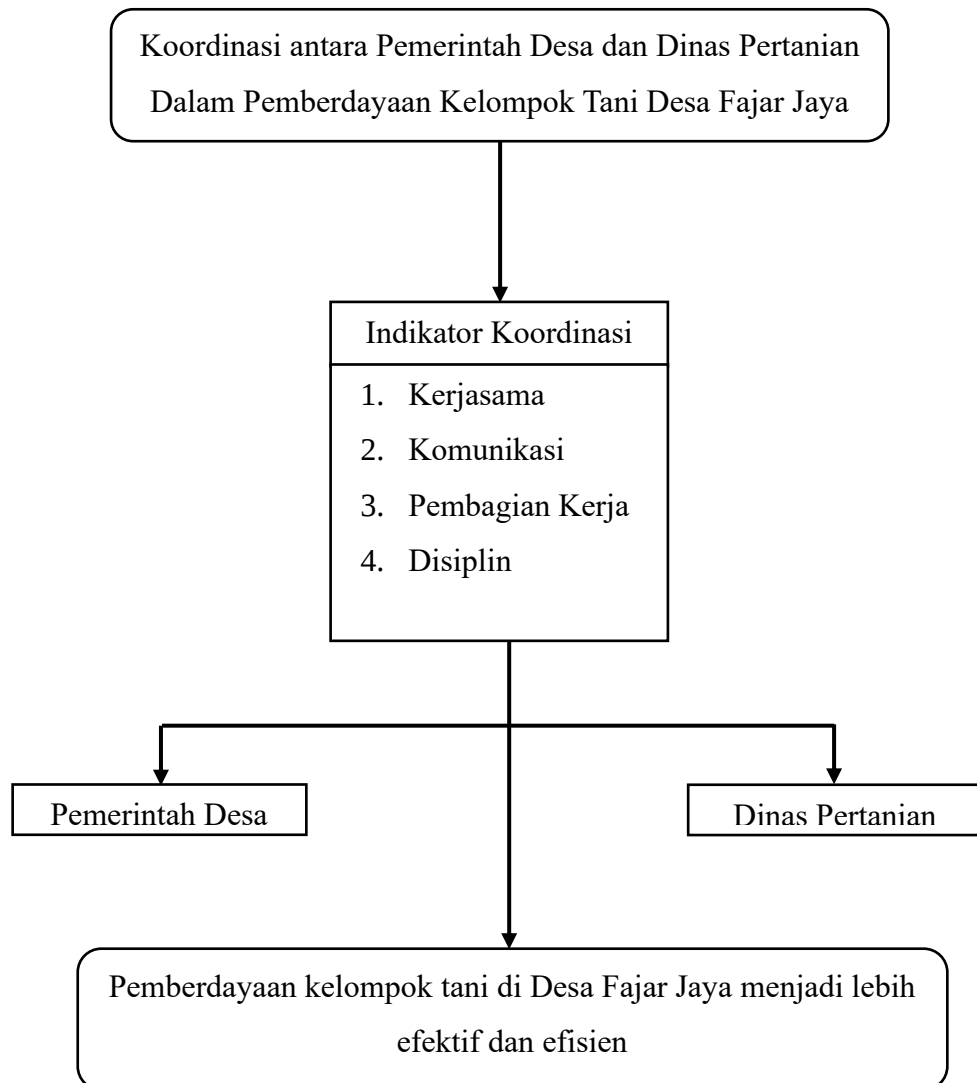
Kerangka pikir (*framework*) adalah suatu struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir dan menghubungkan berbagai konsep, teori, dan data dalam suatu penelitian atau proyek. Kerangka pikir membantu peneliti untuk memahami masalah yang sedang diteliti.

Pemberdayaan pada kelompok tani tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian supaya program dan kebijakan yang dibuat selaras serta sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di Desa Fajar Jaya. Keberhasilan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dipengaruhi oleh faktor kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian bisa dalam bentuk pembuatan program pemberdayaan seperti sosialisasi pada kelompok

tani, melakukan pelatihan pertanian, melakukan pendampingan, serta kunjungan secara langsung di lahan pertanian kelompok tani yang ada di Desa Fajar Jaya. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam proses pembuatan aturan dan kebijakan untuk melakukan pemberdayaan pada kelompok tani. Pembagian kerja yang tepat antara Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian akan memaksimalkan perannya masing-masing dalam pemberdayaan kelompok tani. Disiplin dalam bekerja dan dilakukan secara berkelanjutan akan membuat keselarasan program dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani Desa Fajar Jaya.

Keempat faktor tersebutlah yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Desa Fajar Jaya dan Dinas Pertanian demi memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pemberdayaan kelompok tani di Desa Fajar Jaya.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir